PENERJEMAH TERSUMPAH: PENGATURAN DAN PRAKTIKNYA (*Sworn Translators: Regulation and Practices*)

Edward James Sinaga
Balitbang Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM R.I, Jakarta
edwardjames88@ymail.com

Tulisan Diterima: 24-01-2020; Direvisi: 10-03-2020; Disetujui Diterbitkan: 11-03-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.19-42>

ABSTRAK

Permohonan pengangkatan calon penerjemah tersumpah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengalami peningkatan. Untuk menindaklanjuti hal ini telah diterbitkan ketentuan yang menjadi dasar dalam teknis pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah. Namun, pengaturan terhadap kualifikasi penerjemah tersumpah hingga saat ini belum ada. Sehubungan dengan banyaknya permintaan dokumen resmi yang diminta oleh sebagian negara tujuan yang mengharuskan untuk diterjemahkan dalam bahasa setempat, maka diperlukan penerjemah yang benar-benar memahami atau menguasai bahasa asal dari dokumen yang diterjemahkan. Secara profesi seorang penerjemah harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil terjemahannya. Untuk itu perlu adanya suatu pengaturan yang jelas tentang penerjemah tersumpah sehingga kedudukannya menjadi jelas dan diakui oleh masyarakat serta dapat melakukan praktik dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Analisis pengaturan terkait profesi penerjemah tersumpah dan praktik penerjemah tersumpah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai syarat Perguruan Tinggi yang dapat melakukan ujian kualifikasi penerjemah dan perlu diadakannya jurusan yang khusus mengenai penerjemah resmi tersumpah di setiap Perguruan Tinggi atau program kuliah kerja lapangan, agar bisa mengakomodir para calon penerjemah resmi tersumpah.

Kata kunci: penerjemah tersumpah; penerjemahan; pengaturan.

ABSTRACT

Requests for appointment of sworn translator candidates at the Ministry of Law and Human Rights have increased. For this reason, the provisions become the basis for the technical appointment, monitoring, and dismissal of sworn translators. However, arrangements for sworn translator qualifications do not yet exist. Due to the large number of official documents requested by some destination countries which require them translating to local language, translators who genuinely understand or master the original language of the document are needed. As a professional translator must take responsibility for the results of their translation. Therefore, it needs to be a definite arrangement for sworn translators so that their position is clear and recognized by the community and can practice well. This research is an empirical legal research. Regulatory analysis related to the profession of sworn translator and practice using a qualitative approach. It is necessary to consider arrangements regarding the requirements of tertiary institutions that can carry out translator qualification exams and the need for special majors regarding sworn, official translators in each tertiary institution or fieldwork program to accommodate prospective official translator candidates.

Keywords: sworn translators; translation; regulation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu badan di dalam negara yang bersandar kepada rakyat yang berdaulat. Kemauan yang dimiliki oleh pemerintah disebut *volunte de corps*, karena pemerintah terdiri dari sekelompok manusia tertentu yang dipercaya oleh rakyat. penyelenggaraan kekuasaan yang baik menurut Plato yang menjadi pemimpin negara haruslah seorang yang dapat menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi. Pada akhirnya Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.

Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya mengakui bahwa kehidupan hubungan atau pergaulan antar masyarakat memiliki batasan yang menjamin hak-hak pribadi dan komunal. Hal tersebut merupakan justifikasi dari prinsip *Rule of Law* yang menjadi ciri dari suatu negara hukum. Negara sebagai suatu lembaga tertinggi harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Untuk melakukan segala kegiatan dalam menciptakan perkembangan dan kemajuan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Sebaliknya pada masyarakat sendiri untuk menciptakan kesejahteraan juga membutuhkan peran serta dan bantuan negara dalam hal ini pemerintah sebagai sesuatu lembaga tertinggi yang memiliki hak untuk menciptakan aturan yang tegas dan jelas untuk menciptakan ketertiban dan kemudahan bagi masyarakat yang mengarah kepada pembangunan nasional.

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukantindakanpemerintahantandasar kewenangan. Eksistensi Indonesia sebagai

negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3): "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)". Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia".

Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum karena dalam negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan belum tersedia maka pemerintah diberi kebebasan bertindak (*discretionary power*) yaitu melalui *Freies Ermessen*, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Kehidupan masyarakat dunia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana batas-batas negara sudah tidak lagi menjadi hambatan untuk saling berinteraksi. Keadaan tersebut secara tidak langsung dapat membawa dampak yang cukup potensial menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, khususnya bagi warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, fenomena ini menjadi suatu kebutuhan dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap *equality before the Law*, dimana setiap orang

mengharapkan untuk mendapatkan layanan di bidang hukum secara adil.

Pemenuhan kebutuhan khususnya pemenuhan kebutuhan di bidang hukum dapat menjadi peluang sekaligus hambatan dalam perubahan global yang sedang terjadi. Sebagai peluang karena adanya berbagai bentuk hubungan hukum antar bangsa di bidang perniagaan maupun di luar bidang perniagaan. Sebagai hambatan masih terdapatnya perangkat aturan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan yang berkembang sehingga menimbulkan keraguan terhadap jaminan dan kepastian perbuatan hukum.

Oleh karena itu keberadaan pelaksana layanan di bidang hukum dituntut untuk lebih profesional, cepat dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam kaitannya dengan layanan hukum dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, baik pada skala nasional maupun internasional.

Secara historis dasar hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian penerjemah tersumpah yang tidak mendapat gaji dari Pemerintah didasarkan pada *Ordonantie* Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dinyatakan dalam *Staatblads* Tahun 1894 Nomor 169. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, dasar hukum dalam mengangkat dan memberhentikan penerjemah tersumpah yang tidak mendapat gaji dari pemerintah (*Staatblads* Tahun 1894 Nomor 169) masih dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga tahun 2002 terdapat dualisme lembaga yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penerjemah tersumpah, yaitu Pemerintah Daerah (khususnya DKI Jakarta) dan Pengadilan.

Sejak tahun 2002 lembaga peradilan (khususnya Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Negeri Surabaya) telah menyatakan bahwa pengadilan sebagai

lembaga yudikatif tidak berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penerjemah tersumpah yang tidak mendapat gaji dari Pemerintah (kewenangan perizinan), karena kewenangan perizinan tersebut ada pada lembaga eksekutif.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Jawa Timur telah melakukan kajian ulang terkait kompetensi dan kewenangan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur syarat dan tata cara pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah. Terdapat pendapat yang melihat adanya kekeliruan dalam menafsirkan kalimat "*Directeur van Justitie*" (atau Direktur Justisi) dalam *Staatblads* Tahun 1894 Nomor 169 yang diterbitkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dimana posisi direktur justisi di bawah struktur gubernur jenderal ditafsirkan sebagai unit (bagian) di bawah struktur pemerintah daerah provinsi (jabatan Gubernur Jenderal dianalogikan sebagai Gubernur Kepala Daerah). Dengan adanya kekeliruan ini maka pada tahun 2013, melalui surat dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa berdasarkan kajian akademis telah disimpulkan bahwa syarat dan tata cara pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah merupakan bagian dari pelayanan hukum yang harus dilakukan oleh instansi hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya syarat dan tata cara pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dihentikan.

Terdapat kondisi bahwa permohonan untuk pengangkatan calon penerjemah tersumpah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) telah mengalami peningkatan, namun belum dapat

ditindaklanjuti mengingat belum adanya ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam teknis pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian profesi penerjemah resmi tersumpah telah memperhatikan aspek penilaian sosiologis, penilaian kemampuan penguasaan bahasa, serta memperhatikan hubungan kelembagaan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian profesi penerjemah resmi tersumpah. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan ketentuan hukum tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian profesi penerjemah resmi tersumpah mengingat acuan peraturan perundang-undangan yang ada hanya berdasarkan ketentuan zaman Kolonial Belanda (*Staatblads* Tahun 1894 Nomor 169).

Selain itu, dalam menghasilkan penerjemah tersumpah tidak terlepas dari peran perguruan tinggi. Sebelum disumpah dan diakui kompetensinya, seorang penerjemah tersumpah harus lulus ujian kualifikasi penerjemah (UKP) sehingga hasil-hasil terjemahannya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Namun, koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal pengangkatan penerjemah resmi tersumpah selama ini belum dilakukan secara maksimal.

Begitu juga dengan bahan ajar pada Fakultas Ilmu Budaya di Perguruan Tinggi belum secara khusus mendalami materi penerjemah/terjemahan. Belum seluruhnya memiliki jurusan atau kurikulum yang mengacu dalam mata ajar calon penerjemah tersumpah. Demikian halnya menyangkut materi penerjemah/terjemahan, saat ini belum memiliki mata ajar yang sudah menyesuaikan sesuai standar internasional.

Berdasarkan Pasal 312 (d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tanggal 29 September 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa Sub Direktorat Hukum Perdata Umum menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin mempekerjakan advokat asing, pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah.

Untuk melaksanakan fungsi pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah, dibentuk Seksi Advokat Asing dan Penerjemah Resmi Tersumpah yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian rekomendasi ijin mempekerjakan advokat asing serta pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah.

Sesuai dengan *Staatblads* Nomor 169 Tahun 1894 (Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 169 tanggal 7 Agustus 1894 tentang Peraturan Penerjemah Tersumpah yang tidak mendapat gaji dari Pemerintah) pengangkatan dan pemberhentian penerjemah tersumpah dilakukan oleh Direktur Van Justitie (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam surat Nomor: PHN-HN.02.04-36 tanggal 3 Agustus 2011 menyatakan bahwa *Staatblads* Nomor 169 Tahun 1894 tentang pengangkatan dan pemberhentian penerjemah tersumpah yang tidak mendapat gaji dari pemerintah belum pernah dilakukan perubahan atau pencabutan.

Namun setelah terbitnya Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, Seksi Advokat Asing dan Penerjemah

Tersumpah segera melakukan pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah. Realisasi pelaksanaan pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah yang sekarang ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sehubungan dengan banyaknya permintaan dokumen resmi yang diminta oleh sebagian negara tujuan yang mengharuskan untuk diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik untuk hubungan bisnis, pendidikan ataupun kegiatan lainnya, maka untuk menjaga keakuratan terjemahan dokumen resmi tersebut sesuai apa adanya dengan dokumen yang diterjemahkan, maka diperlukan penerjemah yang benar-benar memahami atau menguasai bahasa asal dari dokumen yang diterjemahkan, selain itu secara profesi seorang penerjemah harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil terjemahannya. Untuk itu perlu adanya suatu pengaturan yang jelas tentang penerjemah tersumpah sehingga kedudukannya menjadi jelas dan diakui oleh masyarakat serta dapat melakukan praktik dengan baik.

Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terkait profesi penerjemah tersumpah di Indonesia?
2. Bagaimana praktik penerjemah tersumpah sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis terkait pengaturan terkait profesi penerjemah tersumpah di Indonesia.
2. Untuk memberikan kejelasan tentang praktik penerjemah tersumpah sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dalam pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pemberian kuesioner kepada beberapa informan yang kompeten.

Sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang memiliki korelasi dengan pengaturan terkait profesi penerjemah tersumpah di Indonesia dan praktik penerjemah tersumpah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain.³ Menurut Arikunto, sumber data dalam Penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Metode kualitatif dalam penelitian kebijakan dilakukan dengan langkah-langkah merumuskan masalah sebagai fokus studi penelitian kebijakan, mengumpulkan data lapangan, menganalisis

-
- 1 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015, hlm.32.
 - 2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280.
 - 3 Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hlm.52.
 - 4 Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.172.

data, merumuskan hasil studi, dan menyusun rekomendasi untuk pembuatan kebijakan.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada informan yaitu Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran, dan Seksi Advokat Asing dan Penerjemah resmi tersumpah Sub Direktorat Perdata Umum. Informan menjawab langsung kuesioner yang telah diberikan menurut pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman kerja yang telah dilaluinya, kemudian mengembalikan kuesioner itu kembali kepada peneliti. Data sekunder dikumpulkan melalui catatan ataupun permintaan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016.

3. Teknik Analisis Data

Dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis ini lebih menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*). Analisis bersifat deskriptif analitis, untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti, dan menganalisis dengan mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna.⁵

PEMBAHASAN

Penerjemah Tersumpah dan Pengaturannya di Indonesia

Kata penerjemah berasal dari bahasa Arab (tarjamah) yang secara umum berarti orang atau alat atau apapun yang

mengkomunikasikan maksud dari bahasa sumber ke bahasa target. Dari segi bidang kerja, penerjemah dikelompokkan menjadi 2, yaitu penerjemah tulis dan penerjemah oral. Penerjemah tulis lebih dikenal dengan penerjemah dokumen sedangkan penerjemah lisan sering disebut interpreter.⁶

Dari isinya, dokumen dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni dokumen hukum (legal) dan dokumen umum. Di antara dokumen hukum adalah: Akta Lahir, Akta Nikah, Akta Pendirian, Akta Perubahan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Perjanjian Kerja, Perjanjian Distribusi, Perjanjian Kerjasama, Piagam Penghargaan, Ijazah (dokumen akademik lainnya), Kartu Tanda Penduduk (dokumen pribadi lainnya), Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Litigasi, Arbitrase, Putusan Pengadilan, Hak Kekayaan Intelektual, Merek Dagang, Paten, Lisensi, Asuransi, Surat Kuasa, dsb. Adapun dokumen umum mencakup semua dokumen selain dokumen hukum, meskipun seringkali di dalamnya terdapat frase bermuatan hukum, seperti sanggahan (*disclaimer*). Dokumen jenis ini meliputi bidang teknik, keuangan, kedokteran, dan sosial (humaniora).⁷

Sementara penerjemah lisan atau *interpreter* sangat diperlukan untuk menjembatani perbedaan bahasa yang merupakan alat utama dalam komunikasi. Dalam prakteknya, *interpreting* (pekerjaan *interpreter*) terdiri dari 2 macam, yaitu simultan dan konsektif.

Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis penerjemah yaitu⁸:

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan Ke II, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm.145.

6 <https://www.scribd.com/doc/57637232/Biro-Penerjemah>, diakses 12 Januari 2020.

7 Ibid.

8 <https://jasa-translate.com/mengenal-lebih-jauh-jasa-penerjemah-tersumpah-regular-dan-native/>, diakses 3 Desember 2019.

1) Penerjemah Tersumpah

Predikat penerjemah tersumpah (*sworn translator*) diberikan apabila calon penerjemah atau seseorang telah mengikuti ujian kualifikasi penerjemahan yang saat ini hanya diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya/Fakultas Sastra, yang lulus dengan nilai A (minimal angka 80). Selanjutnya, calon penerjemah tersumpah ini akan diambil sumpahnya atau dilantik oleh pejabat yang berwenang. Di Indonesia, penerjemah resmi tersumpah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebelum keluarnya Permenkumham. Dan sebagian penerjemah tersumpah mendaftarkan tanda tangan atau cap mereka pada kedutaan-kedutaan besar di Jakarta guna mempermudah pihak kedutaan untuk memvalidasi hasil terjemahan tersebut melalui cap dan tanda tangan yang telah didaftarkan tersebut, sehingga klien (pengguna jasa penerjemahan) dimudahkan. Jasa penerjemah tersumpah biasanya dibutuhkan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen pribadi seperti akte lahir, ijazah, raport siswa, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Jasa ini diperlukan terutama oleh mereka yang bermaksud untuk melanjutkan sekolah di luar negeri atau mengurus dokumen keimigrasian di luar negeri.

Para penggelut bisnis (*marketer, entrepreneur, tenaga riset pasar*), pencari beasiswa ke luar negeri, penulis, *traveller*, maupun para pencari kerja (*jobseeker*) di tingkat internasional, semuanya memerlukan asistensi profesional dalam hal alih bahasa (*translation*) yang dapat menjamin dokumen-dokumen mereka menjadi legal, dipahami dengan baik dan diakui oleh masyarakat internasional atau negara yang dituju.

Para penggelut bisnis kerap berhubungan dengan orang asing seperti urusan ekspor-impor yang tertuang dalam berkas dokumen atau negosiasi langsung. Demikian pula pembuatan SOP, akta perusahaan, SIUP, TDP,

perjanjian/MoU, peraturan perusahaan, dan laporan keuangan tahunan. Dalam keperluan sedemikian, penerjemah tersumpah sering menjadi kebutuhan. Beberapa dokumen *corporate* ada juga cukup dengan layanan regular standar (*non-sworn*) mengingat hanya digunakan internal perusahaan dan sifatnya umum, seperti pedoman umum karyawan, atau publik lokal, berupa manual pengguna.⁹ Sementara itu, bagi para pencari beasiswa ke luar negeri, jasa penerjemah tersumpah juga cenderung lebih diminati karena banyaknya dokumen personal yang bersifat rahasia (*confidential*), yang perlu diterjemahkan secara legal untuk melengkapi persyaratan pendaftaran.

Bagi kalangan perusahaan (*corporate*), jasa penerjemah tersumpah dibutuhkan untuk menerjemahkan *corporate documents* seperti kontrak kerja, perjanjian jual beli, proposal bisnis, MoU, SOP, laporan keuangan tahunan, dan lain sebagainya. Semua jenis dokumen ini memerlukan jasa penerjemah tersumpah yang dapat menjamin legalitas saat digunakan serta kerahasiaan informasi di tingkat yang paling tinggi. Di sini lah letak keunggulan jasa penerjemah tersumpah dibanding layanan jasa penerjemah lainnya. Di sisi lain, karena tenaga penerjemah tersumpah yang terbatas sedangkan permintaan tinggi, sehingga jasa penerjemah tersumpah dapat dikatakan memakan waktu yang paling lama. Di samping itu, tenaga penerjemah tersumpah bekerja dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi sehingga sering meminta konfirmasi atas konten/isi dokumen sumber beberapa kali pada bagian yang dianggap janggal selama pengerjaan.¹⁰

Bagi mereka yang berstatus penerjemah tersumpah, pada umumnya akan mendatangi kedutaan-kedutaan besar negara-negara terkait untuk mendaftarkan tanda tangan beserta stempel miliknya agar memudahkan

9 Ibid.

10 Ibid.

proses validasi dokumen terjemahan di pihak kedutaan.

2) Penerjemah Regular

Selain penerjemah tersumpah ada pula penerjemah regular (*non-sworn*) yang tak kalah tenar di kalangan pencari jasa penerjemahan. Selain tarif yang tentu lebih terjangkau dibandingkan jasa penerjemah tersumpah, jasa penerjemah regular juga sanggup menerima pengerjaan bermacam-macam dokumen yang bersifat umum (*non-confidential*) dari berbagai kalangan masyarakat dan profesi secara profesional standar, dan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Seorang penerjemah regular tentu juga memiliki kemampuan penerjemahan yang baik apabila telah memiliki cukup jam terbang, karena telah berhadapan dengan berbagai tipe dokumen. Permintaan penerjemahan dari berbagai sektor profesi maupun materi terjemahan yang beragam, membuat seorang penerjemah regular senantiasa *update* dengan kosakata baru setiap harinya dan terlatih menggunakannya pada konteks yang tepat. Jasa penerjemah regular yang pada umumnya menjadi permintaan favorit antara lain untuk penerjemahan buku teks dan *e-book*, konten *website*, abstrak jurnal, artikel media massa, surat menyurat dan surat elektronik (*e-mail*), naskah pidato, dan berkas lainnya.

Untuk itu dalam memilih jasa penerjemah regular, perlu memperhatikan hal-hal berikut¹¹:

- a) Memiliki kecepatan sekaligus ketepatan

Pastikan bahwa jasa penerjemahan yang dipilih memang berkualitas dan memiliki tim yang solid sehingga dapat menerjemahkan dokumen atau berkas yang dimiliki dalam waktu relatif singkat. Seringkali tim penerjemah regular yang solid menyediakan layanan ekspres dengan penerjemah yang memiliki kecepatan sekaligus ketepatan.

- b) Menjamin kerahasiaan dokumen

Meski dokumen tersebut adalah dokumen biasa, tetap harus memilih jasa penerjemah yang mampu menjaga kerahasiaan isi dokumen. Hal ini penting karena agar dokumen yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang tidak bertanggung jawab, Jaminan ini setidaknya bisa dilihat dari *social proof* klien-klien sebelumnya mengenai suatu jasa penerjemah. Ini bisa nampak melalui testimoni-testimoni, serta interaksi positif yang dibangun dengan klien melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.

- c) Memberikan layanan revisi

Penyedia jasa penerjemah profesional memang minim membuat kesalahan dalam proses menerjemahkan, namun konsumen mungkin saja merasa kurang suka dengan gaya pada penerjemahan istilah-istilah tertentu. Oleh sebab itu perlu memilih jasa penerjemah yang menawarkan layanan revisi secara cuma-cuma sehingga hasil terjemahan akan betul-betul sesuai dengan gaya yang Anda kehendaki.

3) Penerjemah *Native*

Penerjemah *native* merupakan seorang penutur asli dari negara tertentu yang bekerja menerjemahkan dokumen bahasa asing lain ke bahasa mereka. Sebagai contoh ada orang China yang memiliki kemampuan yang baik dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia sehingga berprofesi sebagai translator profesional, maka setiap kali ada *order* layanan jasa penerjemah *native* untuk penerjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Mandarin, atau Bahasa Indonesia ke Bahasa Mandarin, dialah yang mengerjakan proyek tersebut. Hasil yang diterjemahkan pun cenderung lebih alami karena mereka tentu lebih mengetahui kosa kata bahasa mereka.

11 Ibid.

Pengaturan penerjemah tersumpah suatu keniscayaan. Penerjemah tersumpah pertama kali diangkat sumpahnya oleh *Secretary Van Justitie*. Sesudah Indonesia merdeka, pengambilan sumpah dilakukan di hadapan pengadilan oleh Kementerian Kehakiman (saat itu masih satu atap dengan lembaga peradilan). Pengambilan sumpah merujuk ke Staatsblad 1859 Nomor 69 tentang sumpah para penerjemah dan Staatsblad 1894 Nomor 16 tentang Para Penerjemah.

Kemudian, perubahan teknis penyumpahan profesi penerjemah sesudah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 ini mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang menggeser teknis penyumpahan dari sebelumnya di hadapan pengadilan menjadi oleh Kepala Daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan menjadi dasar hukum penggunaan jasa penerjemah tersumpah dalam menerjemahkan dokumen-dokumen resmi tersebut. Seperti yang terdapat pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjadi hal yang berbunyi:

Ayat (1):

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia".

Ayat (2):

"Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris".

Ketentuan terbaru tentang penerjemah di Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 disebutkan bahwa penerjemah tersumpah merupakan orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Adapun tata cara dan syarat menjadi penerjemah tersumpah yang harus memenuhi persyaratan adalah:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Berkewarganegaraan Indonesia.
- c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di Kantor Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- e) Sehat jasmani dan rohani.
- f) Telah lulus ujian kualifikasi Penerjemah yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Organisasi Profesi atau Perguruan Tinggi.

- g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. dan
- h) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.

Dalam hal belum ada Organisasi Profesi atau Perguruan Tinggi yang mendapatkan lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, maka ujian kualifikasi Penerjemah dapat diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Persyaratan permohonan sebagaimana dijelaskan di atas, harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Permohonan pengangkatan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan dalam keputusan pengangkatan penerjemah tersumpah. Pengambilan keputusan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengambilan surat keputusan wajib dilakukan oleh pemohon atau kuasanya dengan melampirkan asli surat bukti tanda terima permohonan dan tanda bukti setor pembayaran permohonan.

Sebelum menjalankan jabatannya, penerjemah tersumpah wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya. Pengambilan sumpah/janji penerjemah

tersumpah dilakukan oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.¹²

Pengucapan sumpah/janji jabatan penerjemah tersumpah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan penerjemah tersumpah diterbitkan. Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu 60 hari, Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah dapat dibatalkan oleh Menteri, kecuali terdapat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji dari pemohon.¹³

Pengambilan sumpah/janji wajib dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji. Berita acara wajib disampaikan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji. Selain menyampaikan berita acara, penerjemah tersumpah juga wajib menyampaikan¹⁴:

- a) Surat pernyataan telah melaksanakan profesi yang ditandatangani diatas materai yang berlaku.
- b) Keterangan tertulis mengenai alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, cap/stempel penerjemah tersumpah.

Sebagai sebuah profesi penerjemah harus memiliki organisasi yang menaunginya. Profesi ini juga memerlukan kualifikasi tertentu. Setidak-tidaknya, keahlian secara akademik yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah profesional menguasai bahasa sumber, menguasai bahasa penerima, memiliki pengetahuan lintas bidang, dan memiliki pengetahuan tentang teks yang akan diterjemahkan. Pentingnya penguasaan bahasa sumber dan bahasa penerima serta pengetahuan lintas bidang bagi

12 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016.

13 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016.

14 Pasal 13 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016.

seorang penerjemah suatu keniscayaan. Penerjemahan tidak hanya menyangkut persoalan kebahasaan tetapi juga terkait dengan bidang ilmu lainnya. Di samping itu, seorang penerjemah akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik jika ia juga memiliki pengetahuan tentang substansi teks yang akan diterjemahkan. Istilah-istilah yang dipakai dalam bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, hukum, kimia, pertanian, peternakan, teknik dan bidang-bidang lainnya akan memiliki makna khusus dan penerjemahannya biasanya sudah dibakukan.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat tentang pekerjaan yang dilakukan¹⁵. Untuk itu penerjemah tersumpah memerlukan kepercayaan yang baik dari masyarakat.

Profesi penerjemah memainkan peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa, khususnya dalam bidang alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju ke Indonesia yang tidak lepas dari kegiatan menerjemahkan dan peranan penerjemah. Keadaan tersebut menempatkan profesi penerjemah sebagai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa karena kegiatan yang dilakukannya dianggap cara yang paling mudah dan murah dalam alih ilmu pengetahuan dan teknologi, keunggulan negara maju di berbagai bidang, seperti Jepang, merupakan salah satu wujud nyata dari kegiatan menerjemahkan.¹⁶

Menjadi penerjemah adalah suatu profesi yang boleh dikatakan sangat strategis. Seorang penerjemah dapat melihat dunia

dari sisi yang berbeda-beda. Sudut pandang keilmuannya harus luas. Keterampilan berbahasanya harus tinggi. Daya ingatnya harus kuat. Ketika menerjemahkan sebuah buku, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya, seorang penerjemah mungkin dapat duduk tenang dan merenung dalam ruang kerjanya. Ia memiliki ruang untuk berpikir. Dengan begitu, hasil terjemahannya tentu akan baik. Persoalannya akan menjadi lain jika penerjemah harus mengalihbahasakan pidato atau kata sambutan yang diucapkan oleh seorang kepala negara ketika berada dalam suatu konferensi atau menjadi interpreter dalam suatu pertemuan internasional. Kecakapan seorang penerjemah atau interpreter sangat diperlukan.

Keluasan wawasan diperlukan karena pekerjaan menerjemah membutuhkan saling keterkaitan bidang ilmu sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di atas. Setiap teks yang akan diterjemahkan memiliki nuansanya sendiri-sendiri. Seni berbahasa dan merangkai kata menjadi kalimat harus dimiliki. Ia harus mampu menghasilkan terjemahan yang terbaca dan dapat dipahami dengan mudah tetapi tidak menyimpang dari bahasa sumber (BS). Seorang penerjemah harus setia kepada BS. Ia harus mampu memindahkan makna dari BS ke bahasa penerima (BP) sedekat dan setepat mungkin. Menurut Saptanto, terdapat teknik penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran digunakan sebanyak 222 kali (88,10%), dan yang berorientasi pada bahasa sumber 30 kali (11,90%). Hal ini menunjukkan bahwa penerjemah cenderung menerapkan metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran.¹⁷

15 Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019).

16 Disimpulkan dari M. Radolf Nasution, *Teori Menerjemah Bahasa Inggris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 5.

17 Wibawa, Saptanto Hari, *Analisis Teknik dan Metode Penerjemahan Serta Dampaknya terhadap Kualitas Terjemahan Metafora Novel of Bees and Mist Karya Erick Setiawan*. Thesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm.53.

Setiap pekerjaan pastilah memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu juga melekat kepada seorang penerjemah. Seorang penerjemah harus jujur dalam menjalankan profesinya. Ia tidak boleh salah dalam melakukan interpretasi baik interpretasi monolingual maupun bilingual. Kesalahan dalam menginterpretasi dan menemukan makna yang terkandung dalam BS dapat berakibat fatal bagi pengguna hasil terjemahannya. Sementara, pengguna hasil terjemahan itu sendiri tidak paham sama sekali dengan pesan yang terkandung dalam BS. Kesalahan prosedur, tidak berjalannya suatu sistem dengan baik, dan akibat-akibat buruk lainnya bisa terjadi karena kesalahan dalam penerjemahan jika sumber informasinya berasal dari bahasa lain yang sudah merupakan hasil penerjemahan. Terkait dengan kejujuran sebagaimana disebutkan di atas, dalam menerjemahkan suatu teks dari BS ke BP, seorang penerjemah tidak boleh menambah, mengurangi dan mendistorsi makna yang terkandung dalam BP. Ini dapat berakibat fatal bagi pengguna hasil terjemahan.

Seorang penerjemah harus mampu bekerja dengan cepat dan tidak boleh terhalang oleh kerumitan-kerumitan linguistik dan kerumitan teknis lainnya yang berlaku pada BS dan BP. Penyelesaian pekerjaan menerjemah tidak disarankan untuk dilakukan dengan mencari jalan pintas. Sebagai contoh, pekerjaan menerjemah yang dilakukan bersama-sama dengan melibatkan orang yang tidak memenuhi keempat persyaratan sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam menjalankan profesinya, seorang penerjemah mungkin saja menerjemahkan buku, dokumen-dokumen penting, perjanjian, akta jual beli, BAP, hasil penelitian, surat wasiat dan lain-lainnya. Tidak tertutup kemungkinan isi dari dokumen-dokumen tersebut sangat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya. Penerjemah harus ikut

menjaga kerahasiaannya. Ini juga bagian dari tanggung jawab moral penerjemah.

Profesi penerjemah sangat strategis sehingga pentingnya penerjemah bekerja dengan jujur, cermat, teliti dan amanah, kepadanya sejumlah persyaratan dan sebuah ikatan harus diberikan. Penerjemah harus lulus ujian kualifikasi penerjemah (UKP). Setelah lulus, kemudian harus disumpah sebagai ikatan untuk selalu mengemban amanah serta setia kepada profesinya.

Sejalan dengan awal mula eksisnya profesi penerjemah, pada 5 Februari 1974 Organisasi Profesi Penerjemah resmi didirikan. Organisasi yang diberi nama Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) berdiri atas prakarsa sejumlah anggota Dewan Kesenian Jakarta, pengurus TIM, serta Direktorat Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan UNESCO di Jakarta. Perjalanan wadah profesi penerjemah ini sempat meredup, dan sempat juga 'mati suri' beberapa waktu sampai akhirnya kembali hidup di tahun 2000. Fase ini menjadi awal mula kebangkitan di mana HPI memperluas cakupan keanggotaan dengan memasukkan penerjemah dokumen dan juru bahasa. Selain itu, fokus HPI juga tidak hanya mencarikan pekerjaan bagi anggota melainkan fokus melakukan peningkatan mutu penerjemah dan juru bahasa.

Kiprah HPI tidak hanya di dalam negeri, namun juga menjadi anggota dari *International Federation of Translators* (IFT) yang merupakan wadah dari organisasi-organisasi profesi penerjemah internasional. HPI juga cukup aktif mengikuti sejumlah kongres sejak tahun 1984 hingga yang terakhir pada tahun 2014 di Berlin, Jerman. Sebelumnya, berdasarkan mandat dari IFT, HPI menggelar *event* tiga tahunan Forum Penerjemah Asia ke-5 di Bogor pada 11-12 April 2007 silam.

Terkait dengan sertifikasi, HPI telah berhasil memperkenalkan Tes Sertifikasi

Nasional yang pertama kali diselenggarakan pada 17 Juli 2010 di Jakarta. Setelah berlakunya Permenkumham, Ditjen AHU Kemenkumham belum pernah menggelar pengangkatan dan penyumpahan. Hal itu, karena Kemenkumham masih menunggu revisi biaya PNPB yang waktu itu masih dibahas tarifnya. Meski demikian, diharapkan agar penerjemah yang telah memenuhi kualifikasi agar segera memohonkan pengangkatan dan penyumpahan. Upaya menyebarluaskan informasi terus dilakukan, seperti sosialisasi ke daerah-daerah terutama yang memiliki fakultas bahasa.

Dalam hal untuk menjaga profesional dan kualitas penerjemah tersumpah perlu memperhatikan proses pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah.

1) Pengangkatan Penerjemah Tersumpah

Pengangkatan penerjemah tersumpah paling tidak harus memperhatikan tiga syarat utama. *Pertama*, penerjemah tersumpah harus memiliki wawasan akademik yang luas yaitu: (1) menguasai bahasa sumber; (2) menguasai bahasa penerima; (3) memiliki pengetahuan lintas bidang; (4) memiliki pengetahuan tentang teks yang akan diterjemahkan.

Kedua, pengangkatan penerjemah tersumpah harus memperhatikan kemampuan *soft skill* calon penerjemah tersumpah seperti kecakapan, kejujuran, integritas, kesabaran, kesetiaan dan ketangguhan sebagaimana yang sebagiannya sudah disebutkan pada pasal 4 Permenkumham penerjemah yang telah dibuat ini. Persyaratan *pertama* dan *kedua* ini dapat diuji, diukur dan diketahui melalui Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP). Penyelenggaraannya mungkin dapat dilakukan oleh lembaga bahasa atau fakultas bahasa. Saat ini namanya fakultas ilmu (pengetahuan) budaya. Ini dilakukan untuk menjamin dan memastikan kualifikasi yang telah dimiliki oleh seorang penerjemah.

Ketiga, persyaratan lainnya yang juga harus menjadi perhatian adalah persyaratan administratif sebagaimana yang sebagiannya telah disebutkan pada pasal 4 ayat 2 rancangan permen yang telah disusun. Ketiga persyaratan ini menjadi penting terutama untuk menjamin produk terjemahan memenuhi standar dan kualitas yang diharapkan. Produk terjemahan itu akan memenuhi standar kualitas yang diminta jika pekerjaan itu dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi standar kualitas pula.

2) Pemantauan Penerjemah Tersumpah

Pemantauan penerjemah tersumpah perlu dilakukan. Karena berbagai pertimbangan pragmatis, penerjemah bisa saja menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain yang dianggap mampu untuk melakukannya. Keterikatan dengan sumpah bisa saja terabaikan untuk sesaat. Persyaratan kedua sebagaimana telah diuraikan di atas diharapkan dapat menutupi celah-celah buruk yang mungkin terjadi dalam melakukan penerjemahan. Namun demikian, sebuah badan yang bekerja memantau kinerja penerjemah perlu dibentuk. Himpunan atau organisasi penerjemah dapat juga mengambil peran itu.

3) Pemberhentian Penerjemah Tersumpah

Pekerjaan menerjemah tidak saja membutuhkan keluasan pengetahuan tetapi juga memerlukan *softskill*, integritas, kecakapan dan ketahanan fisik. Oleh sebab itu, pembatasan-pembatasan dan bahkan pemberhentian penerjemah tersumpah dapat dilakukan. Penerjemah tersumpah dapat diberhentikan jika ia dalam melakukan pekerjaannya telah melanggar etika profesi. Pelanggaran terhadap etika profesi dapat berdampak buruk kepada terjemahan yang dihasilkannya. Di samping itu, pembatasan usia juga perlu menjadi pertimbangan. Keseringan melakukan penerjemahan juga menjadi aspek yang diperhitungkan. Keterampilan berbahasa seorang penerjemah

akan menurun seiring dengan jaranganya ia melakukan penerjemahan.

Pemaknaan penerjemahan salah satunya disampaikan oleh Catford¹⁸ yang menyatakan bahwa penerjemahan merupakan penggantian materi tekstual dalam satu bahasa ke dalam bahasa lain yang sepadan. Selain itu, dari kutipan Aris Wuryantoro, Nida dan Taber yang mengatakan bahwa penerjemahan meliputi kegiatan menghasilkan kembali pesan ke dalam bahasa penerima dengan kesepadanan yang hampir mirip dengan bahasa asli, baik dalam makna maupun gaya bahasanya¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa Catford menitikberatkan penerjemahan pada proses pengalihan bahasa sedangkan Nida dan Taber masuk lebih dalam dengan memperhatikan isi pesan teks bahasa sasaran yang disampaikan haruslah 'sepadan', baik dalam makna maupun gaya bahasa yang digunakan dalam teks bahasa sumber.

Dalam melakukan penerjemahan, tidak sedikit menghadapi permasalahan. Permasalahan penerjemahan yang dihadapi bukan hanya dalam mentransfer atau mengubah bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Seperti yang diungkapkan Nida dan Taber, mengenai isi pesan yang harus sepadan juga membuat permasalahan pengalihan budaya menjadi kompleks. Kemudian, Karamanian yang dikutip oleh Putro juga menyatakan bahwa proses penerjemahan tidak hanya memiliki fokus pada pengalihan bahasa semata, tapi juga pada pengalihan budaya²⁰. Agung menggunakan metode penerjemahan

dan kualitas diperoleh hasil analisis data penerjemahan yang diaplikasikan dalam 210 terjemahan dari aspek kualitas terjemahan menunjukkan dalam aspek keakuratan, ditemukan 129 data atau 61.43% termasuk akurat dan 81 data atau 38.57% termasuk kurang akurat.²¹

Permasalahan budaya memang sangat penting. Kesalahpahaman dalam penerjemahan budaya dapat menggeser makna atau pesan dari teks asli. Basnett mengutip Gentzler (2001) menyatakan bahwa ada dua perubahan penting dalam perkembangan teoritis dalam teori penerjemahan yaitu (1) perubahan teori berorientasi sumber ke teori sasaran, dan (2) perubahan untuk menyertakan faktor-faktor budaya sebagaimana elemen kebahasaan dalam model pelatihan penerjemahan²². Selain itu, Toury (1978) menyatakan bahwa penerjemahan merupakan aktivitas yang tak dapat disangkal melibatkan setidaknya dua bahasa dan dua tradisi budaya. Hal ini jelas menegaskan bahwa proses menerjemahkan secara langsung maupun tidak juga melibatkan budaya di dalamnya. Dengan demikian penerjemah harus dapat memahami makna budaya yang ada di dalamnya sehingga terhindar dari bergesernya makna yang akan disampaikan.

Ada berbagai macam kesulitan yang dihadapi penerjemah dalam melakukan proses penerjemahan. Nababan²³ pada makalah yang disajikan dalam Kongres Nasional Penerjemahan, di Tawangmangu, 15-16 September 2003, menyatakan

-
- 18 J. C. Catford, *A Linguistic Theory of Translation: an Essay in Applied Linguistics*, (London: Oxford University Press, 1965), hlm. 20.
- 19 Aris Wuryantoro, *Translation Procedures in the Translation of Scientific Terms in Textbook*, materi dalam International Conference: Translation & Interpreting Studies in Indonesia, Jakarta, 28-29 November 2005, p. 2.
- 20 Ida Bagus Putra Yaduya, *Masalah Penerjemahan: Sebuah Tinjauan Teoritis*, 2010, p.7.

- 21 Nugroho, Muhammad Agung, *Translation Method and Quality on Passive Voice in 1984 Novel by Landung Simatupang*. Thesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm.120.
- 22 Susan Bassnet, *Culture and Translation dalam Topics in Translation: A Companion to Translation Studies*, (Great Britain, 2007), p. 15.
- 23 Nababan, M.R. 2003. *Arah Penelitian Penerjemahan*, Makalah disajikan dalam Kongres Nasional Penerjemahan, di Tawangmangu, 15-16 September 2003.

bahwa kegiatan penerjemahan dipengaruhi oleh klien dan pembaca. Ia kemudian menambahkan²⁴ dalam makalahnya yang berjudul “Kecenderungan Baru dalam Studi Penerjemahan” bahwa pencapaian penerjemahan sebagai mediator yang menyampaikan pesan secara komunikatif dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya serta ideologi penulis teks bahasa sumber, penerjemah, dan klien atau pembaca teks bahasa sasaran. Ia juga menambahkan dalam makalahnya²⁵ dalam *Translation Theory* bertema “Penerjemahan dan Budaya” bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi penerjemahan: kompetensi penerjemah, kebahasaan, dan budaya. Untuk unsur budaya, House²⁶ menyatakan bahwa dalam penerjemahan, penerjemah melakukan terjemahan atau pengalihan budaya, bukan bahasa.

Cahyadi²⁷ dalam artikelnya, “Kesulitan-kesulitan dalam penerjemahan,” menyatakan bahwa masalah-masalah dalam penerjemahan adalah sistem bahasa sumber dan bahasa sasaran berbeda, kompleksitas semantik dan stilistik, tingkat kemampuan penerjemah berbeda-beda, tingkat kualitas teks bahasa sumber, dan masalah keterbacaan teks.

Dalam hal Sistem Bahasa Sumber dan Bahasa Sasaran seperti dokumen hukum perlu perhatian khusus. Untuk penerjemahan dokumen hukum harus memiliki kemampuan yang baik di bidang hukum karena bahasa hukum memiliki keunikan. Penerjemahan dokumen hukum yang akurat sangat mempengaruhi makna, yang mengakibatkan tidak terjadi kesalahan tafsir makna. Penerjemahan dokumen hukum merupakan salah satu proses paling menuntut kemampuan bahasa hukum yang unik, bahkan bagi penerjemah hukum paling profesional sekalipun. Penerjemahan dokumen hukum membutuhkan banyak pengalaman dengan bahasa dan istilah hukum, pengetahuan mendalam akan beragam sistem hukum di berbagai negara, serta membutuhkan waktu cukup lama untuk menerjemahkan dokumen hukum. Konteks dalam dokumen hukum harus diterjemahkan secara akurat ke dalam bahasa target, karena kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah hukum yang serius. Oleh karena itu, penerjemahan hukum tidak memiliki ruang untuk kesalahan dan membutuhkan penerjemah hukum untuk melakukannya dengan benar. Hal sensitif serta pentingnya dokumen hukum berarti dokumen ini hanya dapat diterjemahkan oleh ahli bahasa atau spesialis hukum berpengalaman.²⁸

Penerjemahan hukum terdiri dari penerjemahan teks dalam sistem hukum yang berbeda dari satu negara dengan negara lain. Dokumen hukum yang diterjemahkan antara lain kontrak, dokumen keuangan, pernyataan saksi, paten, undang-undang dan surat wasiat. Proses penerjemahan hukum berhubungan dengan istilah dan masalah hukum. Oleh karenanya, dibutuhkan penerjemah hukum yang menguasai bahasa asal dan bahasa target serta pengalaman

- 24 Nababan, M.R. 2004. *Kecenderungan Baru dalam Studi Penerjemahan*. Makalah disajikan dalam Semiloka Penerjemahan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2004.
- 25 Nababan, M.R. *Translation Theory: Penerjemahan dan Budaya*. [diterbitkan pada 21 Oktober 2008] Tersedia pada: <http://www.proz.com/translation-articles/articles/2074/1/Penerjemahan-dan-Budaya>.
- 26 House, J, *Universalities versus Culture Specificity in Translation*, dalam Alessandra Ricardi (ed.). *Translation studies: Perspective on an Emerging Discipline*, (Cambridge: University Press, 2002), hlm. 92.
- 27 Cahyadi. *Kesulitan-kesulitan dalam penerjemahan*. [diterbitkan pada 8 Mei 2010] Tersedia dalam: http://english314jtw.blogspot.com/2010/05/kesulitan-kesulitan-dalam-penerjemahan_08.html.

- 28 <https://www.cekindo.com/id/blog/penerjemahan-dokumen-hukum-indonesia>, diakses 4 Desember 2019.

dengan sistem hukum dari berbagai negara. Penerjemahan hukum dianggap jauh lebih rumit dibandingkan penerjemahan biasa. Penerjemahan biasa hanya membutuhkan alih bahasa langsung dan penulisan umum, sementara penerjemahan hukum membutuhkan bahasa hukum yang mencakup beragam teks hukum.

Penerjemahan dokumen hukum itu penting, karena bahasa hukum suatu dokumen sangat dipengaruhi oleh struktur sistem hukum serta budaya negara. Hukum dan undang-undang di Indonesia ditentukan dan berubah sesuai dengan budaya dan perilaku bangsa. Oleh karena itu, konteks hukum juga dipersonalisasi berdasarkan budaya di Indonesia dalam cara yang mudah dimengerti orang. Tidaklah asing jika saat mengacu pada hukum dan regulasi di Indonesia, beberapa terminologi hukum tidak dapat ditemukan dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggris. Konsep-konsep hukum tertentu juga dapat dirumuskan berbeda dalam bahasa Indonesia. Hasilnya, hanya penerjemah hukum profesional yang dapat menaklukkan tantangan ini untuk memastikan penerjemahan akurat antar kedua bahasa.

Alasan lain pentingnya penerjemahan hukum adalah misinterpretasi dalam penerjemahan dokumen hukum dapat berujung pada hasil mengerikan akibat penilaian yang berbeda. Hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap individu terkait, bahkan yang lebih buruk lagi jika menyangkut hubungan diplomatik dan keamanan nasional.

Penerjemah dokumentasi hukum profesional harus memiliki pengalaman serta mampu memberikan hasil penerjemahan berkualitas tanpa salah interpretasi. Berikut beberapa atribut yang wajib dimiliki penerjemah hukum²⁹:

- a) Profil penerjemah hukum seperti kualifikasi, pengalaman dan sertifikasi profesional.
- b) Pengetahuan mendalam akan sistem hukum dari negara asal bahasa dokumen.
- c) Kemampuan melakukan riset mendalam untuk terminologi atau konsep hukum yang tidak jelas.
- d) Kesadaran penuh akan pembaca target dan siapa yang mungkin membaca dokumen terjemahan tersebut.
- e) Penguasaan mendalam akan kedua bahasa ditambah dengan kemampuan menulis yang mumpuni.
- f) Pengalaman dalam industri lain menjadi nilai tambah.

Penerjemahan dokumen hukum termasuk dalam kategori penerjemahan dokumen khusus yang mencakup juga penerjemahan kitab suci. Ini berarti bahwa terjemahan dokumen jenis itu harus diakui dan diresmikan sehingga penerjemahnya juga harus memperoleh kewenangan untuk menghasilkannya. Dokumen hukum yang dimaksud adalah semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, mulai dari undang-undang berikut turunannya, surat perjanjian, surat paten, hingga akta dan sertifikat. Sederet contoh itu memperlihatkan dengan jelas bahwa isi dan bentuk dokumen hukum berbeda dari yang terdapat dalam dokumen lain. Akibatnya, penerjemahan dokumen hukum memerlukan ideologi, metode, dan prosedur yang khas juga agar hasilnya benar dan bagus. Menurut Sutopo penentuan jenis kalimat akan mempengaruhi tingkat keterbacaan suatu teks.³⁰ Terjemahan dokumen hukum yang bagus memenuhi tiga syarat yaitu³¹:

30 Sutopo, Anam, *Penerjemah dan Penerjemahan. Dalam Lintas Pemahaman*. Surakarta: C.V Jasmine, 2015, hlm. 131.

31 <http://queenpenerjemah.blogspot.com/2013/10/penerjemah-teks-hukum-perlu-penerjemah.html>, diakses 26 November 2019.

29 Ibid.

- a) Terjemahan yang baik harus akurat (*accurate*) dan sepadan (*congruent*) bila ditinjau dari aspek kebahasaan ataupun hukum sebagai isinya. Artinya, “Dalam penerjemahan dokumen hukum, istilah-istilah hukum harus diterjemahkan secara tepat pula semantiknya agar tidak terjadi salah tafsir”.
- b) Tolok ukur utama dalam penilaian penerjemahan adalah kesepadanan makna antara dokumen sumber dan dokumen sasaran. Terjemahan dianggap salah apabila mengandung distorsi makna referensial (tidak sekadar dianggap sebagai “terjemahan buruk”).
- c) Terjemahan dokumen hukum harus setia pada dokumen sumber dan memperhatikan laras bahasa, gaya bahasa, dan derajat keformalan dalam bahasa hukum.

Pemenuhan kebutuhan di bidang hukum dapat menjadi peluang sekaligus hambatan dalam perubahan global yang sedang terjadi. Sebagai peluang karena adanya berbagai bentuk hubungan hukum antar bangsa di bidang perniagaan maupun di luar bidang perniagaan. Sebagai hambatan masih terdapatnya perangkat aturan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan yang berkembang sehingga menimbulkan keraguan terhadap jaminan dan kepastian perbuatan hukum. Oleh karena itu keberadaan pelaksana layanan di bidang hukum dituntut untuk lebih profesional, cepat dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam kaitannya dengan layanan hukum dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, baik pada skala nasional maupun internasional.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai satuan kerja yang langsung melayani masyarakat di bidang pelayanan jasa hukum, tunduk pada prinsip pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Hukum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pemantauan dan Pemberhentian Penerjemah resmi tersumpah merupakan salah satu program kerja Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Program kerja ini dimaksudkan untuk memberikan atau menyampaikan tentang arti penting layanan jasa hukum calon penerjemah resmi tersumpah di negara Indonesia. Hal tersebut dipandang perlu untuk dilaksanakan karena merupakan tugas dan fungsi dari Seksi Advokat Asing dan Penerjemah Tersumpah pada Sub Direktorat Hukum Perdata Umum untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang pemberian calon penerjemah resmi tersumpah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pembuatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penerjemah resmi tersumpah merupakan inisiatif Ditjen AHU. Jika merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana salah satu uraian tugas pokok dan fungsi pada unit di Ditjen AHU pada Pasal 312 (d) terkait dengan tugas penyiapan pemberian rekomendasi pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah.

Ketentuan *Staatblads* Tahun 1894 Nomor 169 menyatakan bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian

penerjemah tersumpah yang tidak mendapat gaji dari pemerintah yang dilakukan oleh "*Directeur van Justitie*" (atau Direktorat Justisi). Kelembagaan ini setelah Kemerdekaan Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai kewenangan yang ada pada Kementerian Kehakiman (*Minister van Justitie*) atau sekarang pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Awalnya Ditjen AHU memperoleh data bahwa hingga tahun 2002 terdapat dualisme lembaga yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penerjemah tersumpah, yaitu Pemerintah Daerah (khususnya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya) serta Pengadilan. Namun sejak tahun 2002 lembaga peradilan telah menyatakan bahwa pengadilan sebagai lembaga yudikatif tidak berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penerjemah tersumpah yang tidak mendapat gaji dari pemerintah (kewenangan perijinan), karena kewenangan perizinan tersebut ada pada lembaga eksekutif.

Pada tahun 2013, melalui surat dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 845/-072.1 tanggal 2 April 2013 perihal Pengambilan Sumpah Penerjemah Tersumpah, dinyatakan bahwa berdasarkan kajian akademis telah disimpulkan bahwa syarat dan tata cara pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah merupakan bagian dari pelayanan hukum yang harus dilakukan oleh instansi hukum di pemerintah pusat yaitu Kemenkumham dan selanjutnya syarat dan tata cara pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dihentikan. Walaupun sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 104 Tahun 2004 tentang Persyaratan Bagi Penerjemah Bersumpah Yang Tidak

Menerima Gaji Dari Pemerintah/Negara di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Akibat penghentian kewenangan pengangkatan dan pemberhentian penerjemah tersumpah oleh Pemerintah Daerah, maka terjadi kekosongan lembaga yang berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian penerjemah tersumpah mengingat belum ada ketentuan lebih lanjut dalam mengatur syarat dan tata cara pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah di Kemenkumham.

Permohonan untuk pengangkatan dan pengambilan sumpah dari calon penerjemah tersumpah di Ditjen AHU telah mengalami peningkatan, namun belum dapat ditindaklanjuti mengingat belum adanya ketentuan perundang-undangan lebih lanjut yang menjadi dasar dalam teknis pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk mewujudkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Ditjen AHU Kemenkumham segera mengambil langkah untuk menyusun Naskah Permenkumham tentang Penerjemah Resmi Tersumpah. Permenkumham tentang Penerjemah Resmi Tersumpah yang disusun merupakan ketentuan terkait teknis yang mengatur syarat dan tata cara pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah. Kemudian peraturan menteri yang telah disusun ini telah melalui proses penyelarasan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah

Tersumpah yang menjadi dasar hukum bagi layanan pengangkatan profesi penerjemah tersumpah yang selama ini terdapat kekosongan hukum.

Kemudian yang terakhir terbit Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah. Dalam permohonan pengajuan, pengangkatan, dan penyumpahan penerjemah tersumpah tentunya dikenakan biaya sesuai Jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaru atas layanan jasa hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif. Permohonan pengajuan calon penerjemah tersumpah per permohonan Rp 500.000, pengangkatan penerjemah tersumpah per orang Rp 2.000.000, dan penyumpahan penerjemah tersumpah per orang Rp 2.500.000.

Praktik Penerjemah Tersumpah Sebelum dan Sesudah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016

Saat ini jangkauan kerja para penerjemah tersumpah telah diperluas. Penerjemah tersumpah diperbolehkan praktik di seluruh penjuru Indonesia. Sebelumnya hanya berlaku sektoral sejauh jangkauan SK Gubernur DKI Jakarta dan SK Gubernur Jawa Timur. Perluasan wilayah kerja hingga ke seluruh penjuru Indonesia itu menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), mengatakan bahwa penerjemah tersumpah yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Setelah aturan terbaru tersebut dapat menerima permintaan (*order*) penerjemahan dari klien dimanapun berada. Sebelum Permenkumham ini terbit, para penerjemah tersumpah diangkat dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Namun, tidak semua Gubernur Kepala Daerah Provinsi melakukan hal itu. Catatan Ditjen AHU, hanya ada dua Gubernur yang mengangkat dan menyumpah penerjemah, yakni Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Timur. Saat ini setelah Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, yang mengangkat profesi penerjemah tersumpah adalah Menkumham.

Profesi penerjemah tersumpah menjadi 'profesi baru' yang mandiri. Itulah sebabnya, Ditjen AHU menganggap perlu dan telah membuat regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengakomodir eksistensi mereka. Namun, Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 mencoba 'membatasi' diri. Maksudnya, aturan ini sebatas menyandarkan pada formalitas administrasi profesi penerjemah tersumpah di Indonesia. Ini membuka peluang ke semua warga negara, karena Permenkumham ini diberlakukan secara nasional. Tidak berlaku sektoral seperti Gubernur DKI atau Gubernur Jawa Timur.

Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 diharapkan menjadi *trigger* bagi asosiasi profesi penerjemah, perguruan tinggi yang membuka fakultas ilmu budaya dan bahasa, serta Kemenristek Dikti untuk menyusun formula yang lebih teknis, seperti standar Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP), pihak

penyelenggara, serta *passing grade* yang menentukan seorang calon penerjemah tersumpah telah cakap untuk berpraktik. Permenkumham ini belum mengatur sampai sejauh itu, hanya menyandarkan pada formalnya saja. Sepanjang ada yang mengajukan sertifikat lulus ujian kualifikasi, maka akan diproses permohonannya untuk diangkat dan disumpah. Diterbitkannya Permenkumham ini menjadi bukti bahwa profesi yang telah ada sejak 'zaman kolonial' akhirnya diakui oleh pemerintah. Aturan baru ini dari segi profesi penerjemah telah diakui oleh pemerintah.

Kepala Subdit Perdata Ditjen AHU menyebutkan bahwa Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) telah memberikan sejumlah masukan penting terkait bagaimana dunia penerjemahan di Indonesia. HPI berharap setelah terbitnya Permenkumham akan berdampak lebih baik buat profesi penerjemah kedepannya. Namun, HPI masih terus berharap agar bisa berdiskusi dengan Ditjen AHU untuk tetap memberi sedikit perspektif untuk aturan teknis lain di bawah Permenkumham tersebut. Ditjen AHU Kemenkumham dalam proses pembahasan penerjemah selalu melibatkan asosiasi profesi, dalam hal ini HPI.

Selain itu dalam prosesnya, juga melibatkan sejumlah perguruan tinggi antara lain Univeristas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Univeristas Indonesia, dan perguruan tinggi lain yang memiliki fakultas ilmu budaya dan bahasa. Alasan melakukan pembahasan dengan sejumlah perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu budaya dan bahasa diharapkan di sana ada banyak penerjemah tersumpah. Selain itu, alasan lainnya karena Ditjen AHU sangat *concern* terhadap individunya, bukan asosiasi profesi yang menaungi penerjemah.

Penerjemah tersumpah telah ada sejak pemerintahan kolonial namun sempat

terhenti sementara di tahun 2011. Saat ini, profesi penerjemah mulai menunjukkan eksistensinya setelah diterbitkannya Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016. Seperti yang dijelaskan sebelumnya penerjemah merupakan seseorang yang memiliki keahlian melakukan terjemahan. Menjadi tersumpah, adalah ketika seorang penerjemah tersebut diangkat sumpahnya oleh Menkumham.

Sebelum pemerintah menerbitkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah yang menjadi rujukan masih mengacu ke *Staatsblad* 1859 Nomor 69 tentang Sumpah Para Penerjemah dan *Staatsblad* 1894 Nomor 16 tentang Para Penerjemah.³² Penerbitan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 dilakukan untuk menghindari terjadi kekosongan layanan kepada masyarakat. Karena sebelumnya masyarakat tidak tahu institusi yang melayani berkaitan dengan penerjemah tersumpah. Apakah harus ke pemerintah daerah (Pemda) atau ke Kemenkumham. Sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 di saat masyarakat mendatangi Kemenkumham berkaitan layanan penerjemah tidak dapat dilayani karena tidak ada *rules*-nya.

Pada awalnya penerjemah tersumpah diangkat sumpahnya oleh *Secretary Van Justitie*. Praktik seperti itu terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, pengambilan sumpah dilakukan di hadapan pengadilan oleh Kementerian Kehakiman (saat itu masih satu atap dengan lembaga peradilan). Payung hukum pengambilan sumpah juga semata-mata merujuk ke *Staatsblad* tanpa adanya regulasi

32 Putra, N.N (2016) *Penerjemah Tersumpah, 'Profesi Peninggalan Kolonial' Yang Kembali Eksis*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fb9072819d3/penerjemah-tersumpah--profesi-peninggalan-kolonial-yang-kembali-eksis>, diakses 18 Desember 2019.

bersifat teknis lainnya. Sehingga, sumpah baru dilakukan ketika ada permohonan yang masuk ke pengadilan. Tanpa permohonan, maka tidak ada pengambilan sumpah karena penyumpahan bukan merupakan salah satu layanan di pengadilan.

Beberapa tahun kemudian, terjadi perubahan teknis penyumpahan profesi penerjemah, tepatnya setelah diterbitkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Salah satu poin dalam aturan, yakni pemisahan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman (yudikatif) itulah yang menggeser teknis penyumpahan dari sebelumnya di hadapan pengadilan menjadi dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pola pengangkatan oleh kepala daerah inilah yang kemudian terus dilakukan hingga Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 diterbitkan. Untuk menjadi penerjemah tersumpah mesti mengikuti dan lulus Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) yang diselenggarakan salah satunya oleh Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (LBI-FIBUI) dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bila memenuhi nilai di atas 80, maka Gubernur DKI Jakarta akan mengambil sumpah dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya.

Namun, pengangkatan oleh Gubernur DKI Jakarta bukan satu-satunya yang dilakukan pemerintah daerah. Kemenkumham mencatat pengangkatan serupa juga dilakukan di Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur. Dasar hukum yang menjadi acuan keduanya sama, yakni *Staatsblad* 1859 Nomor 69. Sayangnya, pengangkatan oleh Gubernur DKI telah berhenti sejak tahun 2011 silam setelah Pemprov DKI melakukan kajian singkat yang pada intinya menyatakan bahwa pengangkatan dan penyumpahan

merupakan ranah dari eksekutif. Dan kajian itu pun disampaikan kepada Kemenkumham.

Untuk sinkronisasi yang dilakukan Pemprov DKI, maka Ditjen AHU Kemenkumham juga melakukan kajian. Hal pertama yang dilakukan adalah penelusuran payung hukum yang digunakan oleh dua daerah, yakni DKI Jakarta dan Surabaya saat melakukan pengangkatan. Hasilnya, tak ditemukan satupun ketentuan peraturan daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum mengenai penerjemah tersumpah. Sehingga Kemenkumham mengkaji sebatas kalimat per kalimat dalam *Staatsblad* 1859 Nomor 69 dan *Staatsblad* 1894 Nomor 16 tentang Para Penerjemah.

Dari hasil kajian ini kemudian dilakukan penyusunan peraturan menteri (Permenkumham) tentang pengangkatan penerjemah tersumpah, karena surat keputusan pengangkatan oleh kepala daerah sifatnya merupakan kebijakan (*policy*), belum ada dasar ketentuan di daerah berupa Perda yang mengatur tentang penerjemah tersumpah, hanya mengacu kepada *Staatsblad*.

Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 telah dimulai pembuatannya sejak tahun 2012. Dimulai dari pembentukan tim untuk mengkaji dan menyusun aturan tersebut di bawah Seksi Penerjemah Tersumpah di Ditjen AHU Kemenkumham. Pembahasan sempat terhenti, lalu kembali intens dibahas mulai tahun 2014. Poin utama yang akan dituju adalah mengenai bagaimana Menkumham benar-benar mengangkat penerjemah tersumpah yang punya kualitas yang baik. Dari beberapa kali menggelar uji publik dengan mengundang sejumlah universitas yang memiliki fakultas bahasa, akhirnya disepakati aturan terbaru ini hanya sebatas menentukan kriteria formil yang mesti dipenuhi setiap orang yang ingin diambil dan diangkat sumpahnya. Sementara, soal teknis penyelenggaraan ujian, standar kualifikasi

diberikan sepenuhnya kepada perguruan tinggi, Kemenristek Dikti, dan asosiasi profesi penerjemah tersumpah. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 ini tidak mengatur sampai teknis penyelenggaraan ujian, standar kualifikasi, hanya menyandarkan pada formalnya saja.

Selanjutnya pada Pasal 22 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 menyebutkan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara lain yang mengatur tentang syarat dan pendaftaran penerjemah tersumpah, dinyatakan tidak berlaku. Menurut peneliti Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 tidak dapat mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 104 Tahun 2004 tentang Persyaratan Bagi Penerjemah Bersumpah Yang Tidak Menerima Gaji dari Pemerintah/Negara di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hal ini bukan merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian perlu perbaikan pada pasal 22 tersebut dengan perbaikan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah yang telah ada sebelumnya harus dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelayanan jasa hukum yang berkaitan penerjemah tersumpah tidak terlepas pada aturan yang mengaturnya. Pengangkatan sumpah penerjemah tersumpah pertama sekali dilakukan oleh *Secretary Van Justitie* dan berlangsung hingga Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, pengambilan sumpah dilakukan di hadapan pengadilan oleh Kementerian Kehakiman (saat itu masih satu atap dengan lembaga peradilan). Payung hukum pengambilan sumpah merujuk

ke *Staatsblad*. Pengangkatan sumpah akan dilakukan jika ada permohonan yang masuk ke pengadilan.

Pemisahan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman (yudikatif) telah menggeser teknis penyumpahan dari sebelumnya di hadapan pengadilan menjadi dilakukan oleh Kepala Daerah. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah merupakan bagian dari pelayanan hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham. Kemudian Kemenkumham menerbitkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah yang menjadi dasar hukum bagi layanan pengangkatan profesi penerjemah tersumpah yang selama ini terdapat kekosongan hukum.

Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 menjadi langkah awal yang baik dalam memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pelayanan jasa hukum mengenai pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah. Kemudian Kemenkumham menerbitkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah yang menjadi dasar hukum bagi layanan pengangkatan profesi penerjemah tersumpah yang selama ini terdapat kekosongan hukum.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah dilakukan oleh Seksi Advokat Asing dan Penerjemah Resmi Tersumpah, Subdit Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Namun demikian, Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 tidak dapat mencabut

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 104 Tahun 2004 tentang Persyaratan Bagi Penerjemah Bersumpah Yang Tidak Menerima Gaji Dari Pemerintah/Negara di Provinsi DKI Jakarta. Karena hal ini bukan merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM.

Saran

1. Perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai syarat-syarat universitas/ perguruan tinggi yang dapat melakukan ujian kualifikasi penerjemah (misalnya, syarat sertifikasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
2. Perlu untuk dilaksanakan sosialisasi di daerah, di seluruh provinsi di Indonesia, sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Cara Pengangkatan Pemantauan dan Pemberhentian Penerjemah Resmi Tersumpah.
3. Perlu diadakannya jurusan yang khusus mengenai penerjemah resmi tersumpah di setiap universitas/perguruan tinggi atau program kuliah kerja lapangan, agar bisa mengakomodir para calon-calon penerjemah resmi tersumpah.
4. Untuk status surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI yang sebelumnya telah mengatur mengenai penerjemah tersumpah hendaknya pada Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2019 berkaitan ketentuan penutup perlu diubah dan disebutkan: "pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah resmi tersumpah yang telah ada sebelumnya harus dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan menteri ini."

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khususnya kepada rekan-rekan Peneliti di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan kepada Bapak Timbul Sinaga dari Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aris Wuryantoro, *Translation Procedures in the Translation of Scientific Terms in Textbook*, materi dalam International Conference: Translation & Interpreting Studies in Indonesia, Jakarta, 28-29 November 2005.
- Cahyadi. *Kesulitan-kesulitan dalam penerjemahan*. [diterbitkan pada 8 Mei 2010] Tersedia dalam: http://english314jtw.blogspot.com/2010/05/kesulitan-kesulitan-dalam-penerjemahan_08.html.
- House, J, *Universalities versus Culture Specificity in Translation*, dalam Alessandra Ricardi (ed.). *Translation studies: Perspective on an Emerging Discipline*, (Cambridge: University Press, 2002).
- Ida Bagus Putra Yaduya, *Masalah Penerjemahan: Sebuah Tinjauan Teoritis*, 2010.
- J.C. Catford, *A Linguistic Theory of Translation: an Essay in Applied Linguistics*, (London: Oxford University Press, 1965).
- M. Radolf Nasution, *Teori Menerjemah Bahasa Inggris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

- Nababan, M.R. *Translation Theory: Penerjemahan dan Budaya*. [diterbitkan pada 21 Oktober 2008] Tersedia pada: <http://www.proz.com/translation-articles/articles/2074/1/Penerjemahan-dan-Budaya>.
- Nababan, M.R. 2004. *Kecenderungan Baru dalam Studi Penerjemahan*. Makalah disajikan dalam Semiloka Penerjemahan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2004.
- Nababan, M.R. 2003. *Arah Penelitian Penerjemahan*, Makalah disajikan dalam Kongres Nasional Penerjemahan, di Tawangmangu, 15-16 September 2003.
- Nugroho, Muhammad Agung, *Translation Method and Quality on Passive Voice in 1984 Novel By Landung Simatupang*. Thesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Putra, N.N (2016) *Penerjemah Tersumpah, 'Profesi Peninggalan Kolonial' Yang Kembali Eksis*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fb9072819d3/penerjemah-tersumpah--profesi-peninggalan-kolonial-yang-kembali-eksis>, diakses 18 Desember 2019.
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan Ke II, (Jakarta: Rajawali, 1998).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Susan Bassnet, *Culture and Transation dalam Topics in Translation: A Companion to Translation Studies*, (Great Britain, 2007).
- Sutopo, Anam, *Penerjemah dan Penerjemahan. Dalam Lintas Pemahaman*, Surakarta: C.V Jasmine, 2015.
- Wibawa, Saptanto Hari, *Analisis Teknik dan Metode Penerjemahan Serta Dampaknya terhadap Kualitas Terjemahan Metafora Novel of Bees and Mist Karya Erick Setiawan*. Thesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Jurnal/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian:
Ayu Ningsih, dkk, "Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019).
- Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019).
- Peraturan Perundang-undangan:**
Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 104 Tahun 2004 tentang Persyaratan Bagi Penerjemah Bersumpah Yang Tidak Menerima Gaji Dari Pemerintah/Negara di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 21 September 1859 Nomor 69 mengenai Sumpah Para Penerjemah (*Staatsblad Van Nederlandsch-Indie*, Nomor 69).
- Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 07 Agustus 1894 Nomor 16 mengenai Para Penerjemah (*Staatsblad Van Nederlandsch-Indie*, Nomor 169).